

02. REFORMASI PERPAJAKAN INDONESIA DAN SINGAPURA: LÜDER'S CONTINGENCY MODEL

by Indrawati Yuhertiana

Submission date: 13-Jan-2020 03:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 1241396546

File name: 02._418-2406-1-PB.pdf (473.42K)

Word count: 7708

Character count: 50893

81
REFORMASI PERPAJAKAN INDONESIA DAN SINGAPURA: LÜDER'S
CONTINGENCY MODEL

Ajeng Eka Farida¹, Susan Nectianari², Sita Ilisri Nareswari³, Musahadah⁴,
Indrawati Yuhertiana⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Airlangga
Email: ajeng.eff@gmail.com

Abstract

Reformasi pajak Indonesia dan Singapura dipicu oleh kondisi yang terjadi di masing-masing negara baik secara internal maupun eksternal. Inovasi pajak yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan reformasi pajak dalam hal pajak penghasilan di Indonesia dan Singapura, menggunakan Model Kontinjensi Lüder untuk menentukan rangsangan, penyedia dan pengguna informasi, dan hambatan implementasi. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari informasi berbasis web pada lembaga keuangan pemerintah di kedua negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Indonesia dan Singapura dalam reformasi pajak. Model Kontinjensi Lüder menunjukkan bahwa reformasi pajak dapat berhasil jika diberi stimulus yang cukup dan meminimalkan hambatan untuk pelaksanaan reformasi pajak. Pendapatan pajak, rasio pajak, iklim investasi, dan tingkat kepercayaan publik yang rendah berkontribusi pada reformasi pajak Indonesia. Sebaliknya, reformasi pajak Singapura dipicu oleh resesi ekonomi, kesediaan untuk meningkatkan keterlibatan investor asing dan beban kerja otoritas pajak.

Abstract

Indonesia and Singapore Tax reform are triggered by conditions that occur in each country both internally and externally. Tax innovation carried out by Indonesia and Singapore are intended to improve the existing conditions. This study aimed to compare the tax reform in terms of income tax in Indonesia and Singapore, using Lüder's Contingency Model to determine the stimuli, providers and users of information, and implementation barriers. We use secondary data obtained from web-based information on government financial institutions in both countries. The research suggests that there are differences between Indonesia and Singapore in tax reform in terms of income tax comprise change stimuli, implementation barriers and user or interested parties who support tax reform. Lüder's Contingency Model suggest that tax reform can succeed if given enough stimulus and minimize barriers to the implementation of tax reform. Tax revenue, tax ratio, investment climate and low level of public's trust contribute to Indonesia's tax reform. On the contrary, Singapore's tax reform is triggered by economic recession, willingness to increase the engagement of foreign investors and workload of tax authorities.

Keyword: Tax Reform, Lüder's Contingency Model, contextual variables

1. PENDAHULUAN

Negara membutuhkan sumber dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan membiayai pengeluaran pembangunan. Salah satu sumber dana bagi penerimaan negara adalah pajak. Menurut Adriani (2005) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak dan dibayarinya berdasarkan peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara guna penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2014, penerimaan pemerintah Indonesia dari sektor pajak adalah sebesar Rp1.146 milyar atau sebesar 73,97% dari total penerimaan Negara. Sedangkan untuk Negara Singapura total penerimaan dari sektor pajak adalah sebesar S\$43,4 milyar atau sebesar 9% dari total penerimaan negara. Pada tahun yang sama, yaitu 2014 *tax ratio* Indonesia adalah sebesar 11,36% sedangkan untuk Singapura *tax ratio* mencapai 13,4%. Data tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan antara *tax ratio* Indonesia dan Singapura sebesar 2,04%. *Tax ratio* digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar porsi penerimaan pajak dalam perekonomian nasional suatu negara, yang digunakan untuk melihat besarnya (indikator) beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat atau yang disebut *tax burden* (Jedrejowicz *et al.*, 2009).

Selain *tax ratio*, untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja penerimaan di bidang perpajakan suatu negara dapat digunakan *tax*

gap. IRS (Internal Revenue Service) mendefinisikan *tax gap* sebagai selisih antara penerimaan pajak dengan potensi pajak yang dipungut, dengan demikian *tax gap* dapat menunjukkan potensi penerimaan yang belum berhasil dipungut oleh petugas pajak. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2014 rasio keputusan penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar 58,87% sedangkan di Singapura tingkat keputusan penyampaian SPT berdasarkan laporan tahunan *Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS) sangat tinggi yakni 9 dari 10 wajib pajak mengembalikan SPT atau sebesar 90%.

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai dengan diterapkannya *self assessment system*, di mana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Sistem ini membuat wajib pajak aktif, sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku (Waluyo, 2010). Reformasi pajak di Indonesia beberapa kali terjadi yaitu pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000 dan 2008 dan salah satu sektor yang dilakukan reformasi pajak adalah pada PPh di mana adanya kebijakan penurunan tarif maupun kebijakan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Tujuan utama dilakukannya reformasi dalam kebijakan fiskal yaitu: (1) Meningkatkan hasil pajak dan (2) Mempromosikan iklim investasi (Beandolo *et al.*, 2008). Salah satu reformasi pajak yang

1
dilakukan di Indonesia yaitu dengan menerapkan tarif berbeda antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Selain itu adanya tarif yang berbeda antara wajib pajak badan juga merupakan salah satu reformasi pajak. Adanya tarif baru ini lebih menguntungkan bagi wajib pajak sehingga harapan pemerintah, kebijakan tarif yang baru akan semakin meningkatkan penerimaan negara (Yanuwanti, 2013). Mulai tanggal 1 Januari 2009, berlaku dua undang-undang pajak baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan juga merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1b) diatur bahwa untuk penghasilan kena pajak wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif sebesar 28%. Namun pada tahun 2010 terjadi lagi perubahan besaran tarif pajak badan yakni menjadi 25% (Pasal 17 ayat 2a).

Singapura sebagai negara maju di ASEAN pada tahun 1980-an juga melakukan reformasi pajak dengan tujuan untuk menjaga daya saing internasional dalam kebijakan pajak; eksistensi badan regulasi pajak, dan sebagai upaya Singapura untuk mengatasi kendala ukuran wilayah dengan berinvestasi di luar negeri, khususnya di Asia Timur. Reformasi pajak di Singapura salah satunya adalah menambah obyek pajak baru yaitu pajak kendaraan bermotor (*Certificate of Entitlement*) dan pajak atas barang dan jasa (*Goods and Services Tax*) yang merupakan

value added tax yang mulai diterapkan pada April 1984 (Asher, 1999). Selain adanya obyek baru dalam pajak, kebijakan tarif pajak juga merupakan salah satu reformasi pajak seperti penurunan tarif PPh badan menjadi 17%.

Alasan peneliti mengkomparasikan *tax reform* Indonesia dengan Singapura adalah karena keduanya merupakan anggota ASEAN yang terikat pada perjanjian MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), di mana Indonesia dapat menjadikan Singapura sebagai tolok ukur dalam persaingan perdagangan bebas tersebut. Hal ini dikarenakan Singapura merupakan negara maju di Asia Tenggara yang memiliki tarif pajak paling rendah dibanding negara anggota ASEAN lainnya. Kemudian alasan peneliti menggunakan *Leader's Contingency Model* karena model ini mampu menjelaskan bahwa perubahan organisasional yang optimal tergantung (kontingent) pada berbagai macam batasan internal maupun eksternal (Haron *et al.*, 2014a).

Motivasi penelitian ini adalah pertama, untuk membandingkan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia dengan Singapura yang terkait pungutan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiyaji and Amir (2005) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan di Indonesia masih harus dibenahi, dimana pencapaian tujuan keberhasilan pungutan pajak masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kurangnya kepastian hukum bagi pembayar pajak. Senada dengan penelitian sebelumnya, Carolina and

Martua (2012) menemukan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan di Indonesia sangat ditentukan oleh *tax culture*, karena wajib pajak dan fiskus secara bersama-sama melaksanakan kewajiban masing-masing. Berbeda dengan Indonesia, tingkat keberhasilan reformasi pajak di Singapura cukup berhasil. Penelitian yang dilakukan oleh Leung *et al.* (1999) menyatakan bahwa reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Singapura adalah dengan cara *reshuffle* tarif pajak (menurunkan tarif pajak). Untuk meningkatkan pendapatan negara, Pemerintah Singapura memperkenalkan pajak baru yaitu pajak perdagangan barang/jasa. Keberhasilan reformasi perpajakan di Singapura dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abeysinghe and Jayawickrama (2008) menemukan bahwa Pemerintah Singapura mampu menjaga tarif pajak yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara sehingga GDP mereka surplus sebesar 13% di tahun 1990-2005.

Kedua, Peneliti mencoba menganalisis variabel kontekstual yang mempengaruhi proses *tax reform* PPh di Indonesia dan Singapura dengan menggunakan *Leader's Contingency Model*, di mana belum ada penelitian sebelumnya mengenai *tax reform* PPh dengan *Leader's Contingency Model* ini. Kebanyakan penelitian yang menggunakan *Leader's Contingency Model* menjelaskan mengenai inovasi sistem akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) Apa sajakah yang menjadi stimuli

kebijakan *tax reform* PPh di negara Indonesia dan Singapura?; (2) Siapa sajakah penyedia dan pengguna informasi kebijakan *tax reform* PPh di negara Indonesia dan Singapura?; (3) Apa sajakah yang menjadi hambatan implementasi kebijakan *tax reform* PPh di negara Indonesia dan Singapura?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui stimuli kebijakan *tax reform* PPh di negara Indonesia dan Singapura, penyedia dan pengguna informasi kebijakan *tax reform* PPh tersebut beserta hambatan implementasinya. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi para akademisi untuk menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan di Indonesia dan Singapura dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam menentukan kebijakan perpajakan agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi MEA.

2. TINJAUAN TEORI

Model Kontinjensi L der (*Leader's Contingency Model*)

L der (1992) mengembangkan *Contingency Model of Governmental Accounting Innovation* yang menjelaskan transisi sistem akuntansi pemerintahan tradisional menuju sistem akuntansi yang lebih informatif *Contingency Model* pada awalnya bertujuan untuk menjelaskan mengapa inovasi akuntansi pemerintahan hanya terjadi di beberapa negara saja (Chan, 1994). Perbedaan sistem akuntansi pemerintah satu negara dengan negara lain dapat dijelaskan dengan

melihat lingkungan di mana sistem tersebut berjalan, yang meliputi kondisi perekonomian, politik, administrasi, dan budaya(Saleh, 2007). Inovasi akuntansi pemerintah dapat terjadi apabila didukung stimuli dan faktor lingkungan yang kondusif. Dapat dikatakan bahwa baik proses maupun *outcome* perubahan sistem akuntansi yang terjadi pada setiap negara dapat berbeda-beda tergantung pada berbagai aspek yang dijelaskan oleh *Leader's Contingency Model*.

Model ini mengidentifikasi baik variabel kontekstual maupun variabel keperilakuan yang berpotensi menjelaskan *outcome* dari proses pemberahan (*reform*) atau inovasi akuntansi pemerintahan(Chan, 1994; Ouda, 2004; Upping & Oliver, 2011). Asumsi dalam model ini adalah bahwa variabel kontekstual akan berpengaruh positif terhadap sikap dan perilaku baik penyedia maupun pengguna informasi keuangan pemerintah (pemangku kepentingan). Kombinasi yang kondusif antara situasi kontekstual dengan sikap/perilaku akan mendukung proses inovasi(Ouda, 2004). Variabel kontekstual meliputi

- 1) Stimuli
Merupakan tahapan awal proses inovasi di mana terjadi peningkatan kebutuhan informasi oleh pengguna yang menuntut kesiapan penyedia dalam memberikan informasi. Contoh: tekanan fiskal, skandal finansial, krisis finansial.
- 2) Karakteristik lingkungan sosial (variabel struktural eksternal pemerintah)
Merupakan lingkungan sosial sektor publik yang mempengaruhi sikap/perilaku

pengguna maupun penyedia informasi terhadap bentuk informasi yang lebih informatif. Contoh: budaya sosial, pasar modal, tekanan kelompok/organisasi tertentu.

- 3) Karakteristik sistem administrasi-politik (variabel struktural internal pemerintah)
Merupakan sistem administrasi-politik sektor publik yang mempengaruhi sikap/perilaku pengguna maupun penyedia informasi terhadap bentuk informasi yang lebih informatif. Contoh: budaya politik, budaya administratif, sistem informasi SDM.
- 4) Hambatan implementasi
Merupakan kondisi lingkungan yang menjadi penghalang proses implementasi yang menghambat maupun mencegah terwujudnya sistem akuntansi yang lebih informatif. Contoh: sistem hukum, kualifikasi akuntan.

Gambar 1
Leader's Contingency Model (1992)



Tujuan *Leader's Contingency Model*(Upping & Oliver,

2011)menekankan pada dua hal yaitu pertama menyajikan kerangka empiris untuk menginvestigasi perubahan akuntansi pemerintah, serta membantu penelitian yang melakukan komparasi perubahan akuntansi pemerintah. Kedua, model ini bertujuan untuk memicu penelitian lebih lanjut untuk meyakinkan, memperbaiki, maupun mencaprakannya.

1 Penelitian Terdahulu

Lider's Contingency Model banyak digunakan untuk menganalisis perubahan sistem akuntansi di antaranya Olorilanto (2008) yang meneliti alasan mengapa Pemerintah Daerah Malagasy tidak mengadopsi akuntansi akrual meskipun telah dikeluarkan regulasinya pada tahun 2005. Dengan menggunakan skema *Lider*, penelitian tersebut menghubungkan kegagalan implementasi akuntansi akrual dengan hubungan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi akuntansi nasional di Malagasy.

Salah (2007) menganalisis kontekstual nasional dan orientasi pengguna pada akuntansi pemerintah Malaysia menggunakan skema Kontinjensi *Lider*. Hasil analisis menunjukkan bahwa konteks nasional akuntansi dan pelaporan pemerintah Malaysia adalah sistem yang berorientasi pada manajemen. Di samping itu, dalam perubahan besar-besaran tersebut dibutuhkan pengaruh yang kuat dari otoritas profesional, terutama yang memiliki tanggung jawab dan pengetahuan terhadap akuntansi sektor swasta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN TAXREFORMDI INDONESIA

Faktadi lapangan kekecewaan dan ketidakpercayaan yang dirasakanmasyarakat terhadap pajak, mengharuskan Pemerintah berbenah diri.Langkah perbaikan ke arah perubahan tentu harus dilakukan dengancara reformasi perpajakan secara menyeluruh. Ada beberapa manfaat yangbisa diperoleh yaitutercapainya tingkat kepatuhan sukarela yangtinggi, tercapainya kepercayaan masyarakat pada administrasi perpajakan,dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan. Tentunya jika reformasi bisa berjalan sesuai rencana, akan mendorong penerimaan pajak karena potensi penerimaan pajak di Indonesia masih cukup besar.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan (*tax reform*). Terdapat lima tahap *tax reform* di Indonesia, yaitu:

- a. *Tax reform* pertama tahun 1983-1985
- b. *Tax reform* kedua tahun 1994
- c. *Tax reform* ketiga tahun 1997
- d. *Tax reform* keempat tahun 2000
- e. *Tax reform* kelima tahun 2002-2009

Tax Reform di Indonesia terus berjalan hingga saat ini dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

2 Tujuan dari reformasi pajak adalah untuk menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan potensi dan kemampuan dalam negeri, khususnya dengan cara

Tax reform PPh di tahun ini mulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Tax reform 1994 antara lain dimaksudkan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan prinsip *self assessment*, yaitu dengan meminimalkan interaksi aparat pajak dengan WP. Tarif PPh tertinggi juga kembali diturunkan dari 35% menjadi 30% dan kembali terbukti bahwa penurunan tarif tidak menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Begitu pula dengan *tax ratio* yang tidak menunjukkan angka penurunan. Selain itu, masa kadaluarsa pajak diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

PPh Final antara lain diterapkan dalam pemungutan PPh atas penghasilan bunga bank yang diterima masyarakat dari deposito, tabungan atau simpanannya di bank dengan tarif 20%. PPh juga diterapkan pada penghasilan dari penjualan tanah dan rumah dengan tarif 5% dari harga jual atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). PPh Final juga diterapkan terhadap transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dengan tarif 1/1000 (satu permil) dari harga jual saham. Penerapan PPh Final telah terbukti efektif dan diminati WP karena selain sederhana dan mekanismenya mudah, juga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi WP dengan penghasilan yang sejenis. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, penerapan PPh Final selain memudahkan dalam perencanaan

besarnya penerimaan pajak, juga karena biaya pemungutannya yang sangat murah, tetapi memberikan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan (Bawazier, 2011).

Tax Reform PPh setelah tahun 1994

Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan utama. Karena tuntutan untuk mencapai tujuan negara memerlukan dana yang besar, sedangkan penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal, maka diperlukan suatu perubahan demi mengatasi masalah tersebut. Alasan lain adalah adanya perkembangan globalisasi perekonomian dunia, maka Indonesia sebagai salah satu negara berkembang turut mengimbangi perubahan tersebut dengan melakukan *tax reform* pasca tahun 1994 agar tetap mampu meningkatkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Reformasi pajak yang diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah reformasi UU Pajak Penghasilan dimana UU Pajak Penghasilan sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali. UU PPh yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pokok-pokok pikiran dalam UU No. 36 Tahun 2008 berlaku efektif per 1 Januari 2009, di mana reformasi pajaknya meliputi:

a. Penurunan tarif PPh

Penurunan tarif PPh ini untuk mengimbangi tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan

daya yang di dalam negeri, mengurangi beban pajak bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

b. Adanya insentif bagi Wajib Pajak Badan.

Bagi Wajib Pajak badan yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif PPh 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan *good corporate governance* dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

Sedangkan bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang bergerak di UMKM.

c. Bagi Wajib Pajak pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan

neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

d. Penurunan tarif bagi wajib pajak penerima dividen.

Semula wajib pajak dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

e. Peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP

4. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Leader's Contingency Model digunakan untuk menilai *tax reform* di Indonesia dan Singapura khususnya Pajak Penghasilan dengan menganalisa variabel kontekstual dalam model tersebut. Skema ini melihat hubungan antara variabel kontekstual dan orientasi pengguna dari *tax reform* untuk menentukan kemungkinan inovasi dalam reformasi perpajakan.

Leader's Contingency Model menyarankan bahwa *tax reform* dapat berhasil jika diberikan cukup stimulus dan meminimalkan hambatan implementasi dari reformasi perpajakan. Penerimaan pajak, *tax ratio*, iklim investasi, kepercayaan masyarakat yang rendah di Indonesia serta perjanjian perdagangan bebas dengan negara ASEAN merupakan pemicu *tax reform* PPh di Indonesia. Sedangkan Singapura yang merupakan negara maju, tetap melakukan inovasi dalam perpajakan karena dipicu oleh resesi ekonomi, keinginan untuk menarik investor asing, dan peningkatan beban kerja otoritas perpajakan.

Penyedia informasi di kedua negara adalah otoritas perpajakan di masing-masing negara sedangkan pengguna informasi di kedua negara adalah wajib pajak, pemungut pajak, dan investor (domestik dan asing).

Leader's Contingency Model juga menganalisis hambatan dari implementasi *tax reform* PPh di kedua negara. Diharapkan hambatan tersebut dapat diatasi dengan melakukan inovasi perbaikan atau membuat kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan tersebut adalah belum membandingkan *tax reform* di sektor pajak lain misalnya PPN di Indonesia dengan GST di Singapura. Keterbatasan lain pada penelitian lain adalah hanya membandingkan kedua negara di ASEAN yaitu Indonesia dan Singapura. Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran untuk penelitian mendatang adalah memperluas pembahasan meliputi *tax reform* di berbagai sektor pajak dan membandingkan seluruh negara di ASEAN.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa sesuai dengan *Leader's Contingency Model* pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi *tax reform* untuk mengoptimalkan *tax reform* PPh.

5. REFERENSI

- Abeyasinghe, T., & Jayawickrama, A. 2008. Singapore's recurrent budget surplus: The role of conservative growth forecasts. *Journal of Asian Economics*, 19(2), 117-124. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.asieo.2008.01.001>
- Adriani, P. J. A. 2005. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Ashor, M. G. 1999. Tax Reform in Singapore 2-3.
- Bowazier, F. 2011. Reformasi Pajak di Indonesia (Tax Reform in Indonesia). *Annual Legislation Indonesia*, 8(1), 1-11.
- Brondolo, J., Silvani, C., La Bergne, B., & Bosch, F. 2008. Tax administration reform and fiscal adjustment: the case of

- Indonesia. (2001-07). *DAP Working Papers*, 1-70.
- 52
Bloom, K. B. 2012. *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance* (Vol. 12). Springer Science & Business Media. 54
- Carolina, M., & Mariana, R. 2012. Tax Culture: Dasar Pelaksanaan Reformasi Perpajakan Menuju Kepastian. Sukarala. *Proceeding Symposium Nasional Perpajakan III Road Map Reformasi Perpajakan Indonesia menuju Good Governance*.
- 1
Chen, J. L. 1994. Accounting and financial management reform in the United States Government: An application of Professor Luder's contingency model. *Perspectives on performance measurement and public sector accounting*. 17-41.
- Chang-Sin, S. (2016, Feb 23). Singapore tax policies must change with domestic needs, global trends. The Business Times Retrieved from.
- Haven, R., Mohamed, N., & Pairo, H. 2014. Luder's Contingency Model As An Antidote For Fraud in Public Sector.
- 81
Jedrzejewicz, T., Kiss, G., & Jursakova, J. 2009. How to measure tax burden in an internationally comparable way? : National Bank of Poland, Economic Institute.
- 42
Leung, H. M., Low, L., & Toh, M. H. 1999. Tax Reforms in Singapore. *Journal of Policy Modeling*, 21(5), 607-617. doi [http://dx.doi.org/10.1016/S0161-8938\(98\)00193-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0161-8938(98)00193-2)
- 19
Luder, K. 1992. A contingency model of governmental accounting innovations in the political administrative environment. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*, 7, 99-127.
- 35
Manasan, R. G. 1990. A Review of Fiscal Policy Reforms in ASEAN Countries in the 1980s.
- 1
Ohoelanto, R. H. 2008. Contingency factors affecting the adoption of accrual accounting in Malaysia Municipalities. *International Journal on Governmental Financial Management*, 8(1), 37-50.
- Onida, H. 2004. Basic requirements model for successful implementation of accrual accounting in the public sector. *Public Fiscal Digest*, 8(1), 78-99.
- 1
Saleh, Z. 2007. Malaysian governmental accounting: national context and user orientation. *International Review of Business Research Papers*, 3(2), 576-584.
- 38
Suryaji, G., & Amir, H. 2005. Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 10(2), 1-13.
- 31
Tanzi, V., & Shorne, P. 1992. The role of taxation in the development of East Asian economies *The Political Economy of Tax Reform, NBER-EASE Volume 1* (pp. 31-65). University of Chicago Press.
- 38
Upping, P., & Oliver, J. 2011. Accounting Change Model for the Public Sector: Adapting Luder's Model for Developing Countries. *International Review of Business Research Papers*, 7(1), 364-380.
- Wahyo, W. 2010. *Perpajakan Indonesia*. 70
- Yanuwanti, D. 2013. Analisis Kinerja Perbankan Sebelum dan Setelah Reformasi Pajak Tahun 2008. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).

02. REFORMASI PERPAJAKAN INDONESIA DAN SINGAPURA: LÜDER'S CONTINGENCY MODEL

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[id.123dok.com](#)

Internet Source

9%

2

[Submitted to Trisakti University](#)

Student Paper

2%

3

[www.kemenkeu.go.id](#)

Internet Source

2%

4

[docplayer.info](#)

Internet Source

1%

5

[Submitted to Universitas Diponegoro](#)

Student Paper

1%

6

[ettyasa.blogspot.com](#)

Internet Source

1%

7

[yabeshulu.blogspot.com](#)

Internet Source

<1%

8

[id.scribd.com](#)

Internet Source

<1%

9

[eprints.umg.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

10

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

11

migassulbar.blogspot.com

Internet Source

<1 %

12

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

<1 %

13

etheses.dur.ac.uk

Internet Source

<1 %

14

journal.trunojoyo.ac.id

Internet Source

<1 %

15

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

16

Edy Edy. "ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PT SATU CITA PROTENZA TAHUN 2014", Reformasi Administrasi, 2018

Publication

<1 %

17

Submitted to Loughborough University

Student Paper

<1 %

18

www.guidemesingapore.com

Internet Source

<1 %

19	www.bppk.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
22	epdf.tips Internet Source	<1 %
23	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to University of Hull Student Paper	<1 %
25	Submitted to 81705 Student Paper	<1 %
26	ortax.org Internet Source	<1 %
27	ww1.indosiar.com Internet Source	<1 %
28	jpom.ui.ac.ir Internet Source	<1 %
29	www.infodinas.ga Internet Source	<1 %

30	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
31	apaperbedaan.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	daniapurbawati.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	peraturanpajak.com Internet Source	<1 %
34	junaardas.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1 %
36	yusufsofyan.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	gifaryytaufik.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	bappeda.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
40	tanyapajak1.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	

<1 %

42

scholarbank.nus.edu.sg

Internet Source

<1 %

43

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

44

ozip.com.au

Internet Source

<1 %

45

dodigundar.blogspot.com

Internet Source

<1 %

46

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

<1 %

47

mmt.its.ac.id

Internet Source

<1 %

48

siklus.lmb.its.ac.id

Internet Source

<1 %

49

Submitted to University of South Australia

Student Paper

<1 %

50

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

51

repozytorium.uni.lodz.pl:8080

Internet Source

<1 %

52

Submitted to State Islamic University of

<1 %

53

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1 %

54

Submitted to Universiti Teknologi MARA

Student Paper

<1 %

55

www.observatorio-iberoamericano.org

Internet Source

<1 %

56

journal.uniga.ac.id

Internet Source

<1 %

57

stan2014bdkmalang.blogspot.com

Internet Source

<1 %

58

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

59

Submitted to Universitas Dian Nuswantoro

Student Paper

<1 %

60

Submitted to Curtin University of Technology

Student Paper

<1 %

61

link.springer.com

Internet Source

<1 %

